

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 25 Tahun 1999, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 1999. UU RI No. 28 Tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 *tentang Bagan Akun Standar*.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 *tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal*.
- Permendagri No. 25 Tahun 2009, *tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Panggabean, Adrian T., P dkk. 1999. *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): konsep dan formula alokasi*. Laporan Akhir.

- Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasan, M. Iqbal. 2001. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, Jakarta, Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. *OECD Journal on Budgeting*: 117-153.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Yuhertiana, Indrawati. 2003. *Principal-Agent Theory Dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik*. Kompak – Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi (September Desember): 403-422.
- Septiani, Aditya. 2005. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang : Perspektif Teori Pengungkapan”, Tesis S2, Undip Semarang
- Abdullah, Syukriy & Asmara, Jhon Andra. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mutiara, Maimunah. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi*. Agustus. Padang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip

- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Usman, Syaikh dkk. 2008. *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Laporan Penelitian : Lembaga Penelitian SMERU. April. Jakarta.
- ,SWAMANDIRI.wordpress.COM. 2008.*Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*:<https://swamandiri.wordpress.com/2008/02/24/agency-theory-dalam-pemerintahan-daerah/>
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Kamaluddin, Rustian. 2009.*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Makalah Bappenas: www.bappenas.go.id.
- Situngkir, Anggiat. 2009. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal: Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara”, Tesis S2, USU Medan.
- Hermawan, A. (2009). *Penelitian Bisnis* . Jakarta: Grasindo.
- Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Mahsun, Moh dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hadi Saputra, MT. 2012. Belanja Barang & Belanja Modal Dalam Perolehan dan Pemeliharaan BMN.Artikel Pengelolaan Perbendaharaan :<http://mengelolaperbendaharaan.blogspot.co.id/2012/08/belanja-barang-belanja-modal-dalam.html>
- Gugus Wandira, Arbie.. 2012. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*,ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang : <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>

- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik)*. November. Semarang.
- Suryanto. 2014. Mekanisme Penyusunan Anggaran. Artikel Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah : <http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/64-anggaran/95-mekanisme-penyusunan-anggaran>
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Septiadi Suhendra, I Made Dwi dkk. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bali Periode 2009-2013. Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 3, No.1. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2009-2013*, Jakarta-Indonesia, Badan Pusat Statistik
- Realisasi APBD Tahun 2009-2013 Se-provinsi Jawa Barat dalam : www.djpk.depkeu.go.id